RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TOBA

TAHUN 2023

SALINAN

BUPATI TOBA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.

Mengingat 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam berntuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
(2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah;

Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

Bab V Penutup

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan

b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
   1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
   3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
   1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
   2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
   1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
   2. Verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

d. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Inspektorat Daerah

Dipindai dengan CamScanner

d. Dinas-Dinas:
   1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
   3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   4. Dinas Sosial;
   5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   7. Dinas Lingkungan Hidup;
   8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
   9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   10. Dinas Kesehatan;
   11. Dinas Pertanian;
   12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   13. Dinas Perhubungan;
   14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
   15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
   16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
   17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
   18. Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan-Badan:
   1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

f. Kecamatan:
   1. Kecamatan Ajibata;
   2. Kecamatan Balige;
   3. Kecamatan Bonatua Lunasi;
   4. Kecamatan Borbor;
   5. Kecamatan Habinsaran;
   6. Kecamatan Laguboti;
   7. Kecamatan Lumban Julu;
   8. Kecamatan Parmaksian;
   9. Kecamatan Porsea;
   10. Kecamatan Siantar Narumonda;
   11. Kecamatan Sigumpar;
   12. Kecamatan Silaen;
   13. Kecamatan Tampahan;
   14. Kecamatan Uluan;
   15. Kecamatan Nassau;
   16. Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 15 JULI 2022

BUPATI TOBA,

Cap/Dto.

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 15 JULI 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto.

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH.
PEMBINA TK.I
NIP. 19750804 200502 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	3
1.4.	Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA		5
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan	9
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	11
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN		15
3.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	15
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja	16
3.3.	Program dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP		22

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Pengertian Ringkas tentang Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba yang selanjutnya disingkat Renja Dinas LH merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1) Persiapan penyusunan Renja, (2) Penyusunan rancangan Renja, (3) Pelaksanaan forum OPD, (4) dan Penetapan Renja. Renja Dinas LH sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrembang Kabupaten Toba dengan tetap mengacu pada Renstra. Selanjutnya Renja Dinas LH tahun 2023 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas LH Kabupaten Toba Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026;
9. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba;

10. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja 2023 Dinas LH Kabupaten Toba ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023 untuk memperbaiki tolok ukur sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan Renja 2023 ini adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup serta penguatan lembaga Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Toba ;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika penulisan

BAB II: Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup

2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III : Tujuan dan sasaran perangkat daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Program-program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
2. Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,Udara dan Laut;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
4. Program Pembinaan dan Pegawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 2(dua) kegiatan yaitu:
   a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH;
   b. Pengawasan Usaha da/atau Kegiatan yang Izin Lingkungna Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH dengan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait denga PPLH.

6. Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daearh Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan

7. Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
8. Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Koordinasi, SInkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan/atau melalui Pengadilan
9. Program Pengelolaan Sampah dengan 4(empat) Kegiatan yaitu:
   a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
   b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali;
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana denga Pengelolaan Persampahan;
   d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
9. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta.

Selain program tersebut diatas didukung oleh program penunjang dari kesekretariatan yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.667.320.974,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). Sumber pendanaan anggaran berasal dari DAU dan DAK

dengan realisasi sebesar Rp. 15.890.043.351,- (lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) atau 100% fisik dan penyerapan anggaran sebesar 95.34 %.

Untuk tahun 2021 hasil evaluasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan output kegiatan yaitu dokumen KLHS RPJMD. Alokasi anggaran sebesar Rp. 185.256.236,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puliuh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.137.736,- (serratus enam puluh enam juta serratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) atau 89%.
2. Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,Udara dan Laut dengan output kegiatan yaitu pengambilan sampel air. Alokasi anggaran sebesar Rp. 86.704.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.478.400,- (tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau 82%.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan output kegiatan pemeliharaan taman kota. Alokasi anggaran sebesar Rp. 382.894.159,- (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 337.438.588,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 88%.

4. Program Pembinaan dan Pegawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 2(dua) kegiatan yaitu:

a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH dengan output kegiatan rekomendasi izin lingkungan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 59.693.822,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.992.959,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 84%.

b. Pengawasan Usaha da/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan monitoring usaha/kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 46.437.184,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.133.184,- (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) atau 74%.

5. Program Pengakuan MHA, Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH dengan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait denga PPLH dengan output kegiatan yaitu data MHA. Alokasi anggaran sebesar Rp. 332.431.102,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus dua rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 300.167.393,-(tiga ratus juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 90%.

6. Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daearh Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan output kegiatan sosialisasi lingkungan hidup. Alokasi anggaran sebesar Rp.32.500.198,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 30.906.898,-(tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 95%.

7. Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan/atau melalui Pengadilan dengan output kegiatan penanganan kasus lingkungan. Alokasi anggaran sebesar Rp.32.130.913,- (tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.181.003,-(tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga rupiah) atau 97%.
8. Program Pengelolaan Sampah dengan 4(empat) Kegiatan yaitu:
   a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dengan output perbup persampahan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 37.661.758,-(tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.377.758,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) atau 81%.
   b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan output penanganan sampah (gaji,BPJS,ULP petugas kebersihan). Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.326.995.315,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.154.953.838,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 93%.
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana dengan Pengelolaan Persampahan dengan output biaya pendamping DAK pengadaan sarana prasarana persampahan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu

rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.639.200,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau 87%.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan output pengadaan sarana prasarana persampahan (DAK). Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.633.796.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 94%.

10. Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan output pembayaran rekening LPJU. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.455.854.970,- (enam milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.419.158.597,- (enam milyar empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99%.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara detail dapat dilihat pada tabel TC-29.

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah…

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (*Output*)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																
2	**11**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**19,195,479,322**			**100**	**3,702,014,650**	**25**	**387,845,253**	**25%**	**10%**	**25**	**387,845,253**	**25%**	**2%**
2	11	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen	40	395,450,000			8	100,000,000	**3**	**0**	**38%**	**0%**	3	-	**8%**	**0%**
2	11	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	40	364,500,000			8	70,000,000	**3**	**0**	**38%**	**0%**	3	-	**8%**	**0%**
2	11	01	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Laporan	130	150,000,000			26	30,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan**	**Persen**	**100**	**13,611,000,000**			**100**	**2,600,000,000**	**25**	**387,845,253**	**25%**	**15%**	**25**	**387,845,253**	**25%**	**3%**
2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Bulan	60	13,500,000,000			12	2,600,000,000	3	387,845,253	**25%**	**15%**	3	387,845,253	**5%**	**3%**
2	**11**	**01**	**2**	**06**		**Aministrasi umum perangkat daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**1,442,175,515**			**100**	**276,000,000**	**25**	**0**	**25%**	**0%**	**25**	**0**	**25%**	**0%**
2	11	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	Jenis	70	42,500,000			14	8,000,000	0	0	**0%**	**0%**	0	0	**0%**	**0%**

2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	103	117,000,000		25	25,000,000	8	0	**32%**	**0%**	8	0	**8%**	**0%**
2	11	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan baha pembersih	Jenis	68	39,900,000		14	8,000,000	6	0	**43%**	**0%**	6	0	**9%**	**0%**
2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan, fotokopy dan penggandaan	Jenis	28	69,500,000		6	15,000,000	2	0	**33%**	**0%**	2	0	**7%**	**0%**
2	11	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan majalah	Jenis	70	52,275,515		14	10,000,000	0	0	**0%**	**0%**	0	0	**0%**	**0%**
2	11	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dalam dan luar daerah	Orang	155	1,121,000,000		31	210,000,000	12	0	**39%**	**0%**	12	0	**8%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penu**	Cakupan sarana dan prasarana	Persen	100	365,000,000		100	70,000,000	**25**	**0**	**25%**	**0%**	25	**0**	**25%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**07**	**10**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jenis	15	365,000,000		3	70,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	0	**0%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**592,261,909**		**100**	**110,000,000**	**25**	**0**	**25%**	**0%**	**25**		**25%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**08**	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan telepon	Jenis	10	136,000,000		2	25,000,000	**2**	**0**	**100%**	**0%**	2	-	**20%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**08**	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pengelola keuangan dan tenaga kontrak	Orang	40	456,261,909		8	85,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah**	**Persen**	**100**	**2,790,541,898**		**100**	**546,014,650**	**25**	**0**	**25%**	**0%**	**25**	**-**	**25%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**09**	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Unit	45	504,000,000		9	99,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**09**	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan	Unit	190	2,113,000,000		38	400,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**09**	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	5	98,155,027		1	25,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**01**	**2**	**09**	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan laptop, pc, mesin kantor dan printer	Unit	70	75,386,871		14	22,014,650	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Dokumen**	**9**	**1,337,687,500**		**1**	**140,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	**11**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten**	**Dokumen**	**11**	**1,135,000,000**		**1**	**140,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	**11**	**02**	**2**	**02**	**01**	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RDTR	Dokumen	9	895,000,000		1	140,000,000	0	0	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**

2	**11**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Koefisien kualitas air dan udara**	**Nilai**	**64.33**	**1,514,100,000**		**64.14**	**150,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	**11**	**03**	**2**	**01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Indeks kualitas air**	**Nilai**	**54.01**	**381,000,000**		**53.81**	**70,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas lingkungan	Titik	190	381,000,000		70	70,000,000	0	0	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**03**	**2**	**03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup**	**Persen**	**100**	**752,100,000**		**100**	**80,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	11	03	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup	Usaha	80	752,100,000		80	80,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Indeks kualitas tutupan lahan**	**Nilai**	**65.08**	**1,777,000,000**		**62.42**	**240,000,000**	**0**	**10,586,460**	**0%**	**4%**	**0**	**10,586,460**	**0%**	**1%**
2	**11**	**04**	**2**	**01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati	Data	8	1,777,000,000		8	240,000,000	**0**	**10,586,460**	**0%**	**4%**	0	10,586,460	**0%**	**1%**
2	**11**	**04**	**2**	**01**	**04**	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan taman kota	Unit	7	1,065,000,000		6	240,000,000	**1**	**10,586,460**	**17%**	**4%**	1	10,586,460	**14%**	**1%**
2	**11**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100**	**1,824,562,000**		**100**	**240,000,000**	**25**	**0**	**25%**	**0%**	**25**	**-**	**25%**	**0%**
2	**11**	**06**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah**	**Persen**	**100**	**1,824,562,000**		**100**	**240,000,000**	**25**	**0**	**25%**	**0%**	**25**	**-**	**25%**	**0%**
2	11	06	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	persentase persetujuan lingkungan	Persen	100	716,500,000		100	75,000,000	**25**	**0**	**25%**	**0%**	25	-	**25%**	**0%**
2	11	06	2	01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	diklat pplh dan ppns	Orang	5	268,500,000		1	50,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	11	06	2	01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	Persentase usaha yang dimonitoring	Persen	100	332,250,000		100	65,000,000	**25**	**0**	**25%**	**0%**	25	-	**25%**	**0%**
2	11	06	2	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi	Persentase Penertiban Usaha	Persen	100	507,312,000		100	50,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**07**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota**	**MHA**	**10**	**1,572,000,000**		**2**	**330,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**

2	**11**	**07**	**2**	**01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan**	**MHA**	**10**	**772,000,000**		**2**	**230,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	11	07	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	data MHA	MHA	9	772,000,000		2	230,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**07**	**2**	**02**		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PPLH**	**MHA**	**10**	**800,000,000**		**2**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	11	07	2	02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,	Pelatihan MHA	MHA	10	800,000,000		2	100,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**08**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah SDM lingkungan hidup**	**Orang**	**520**	**680,000,000**		**200**	**200,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	**11**	**08**	**2**	**01**	**03**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan**	**Orang**	**520**	**680,000,000**		**200**	**200,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
						Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	penyuluhan lingkungan hidup	Orang	300	300,000,000		200	200,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**10**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**	**Persen**	**100**	**280,000,000**		**100**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	**11**	**10**	**2**	**01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak lintas kabupaten/kota**	**Persen**	**100**	**280,000,000**		**100**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**-**	**0%**	**0%**
2	11	10	2	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	persentase penanganan kasus lingkungan hidup	Persen	100	280,000,000		100	50,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	**11**	**11**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota**	**Persen**	**79**	**11,381,000,000**		**75**	**2,535,000,000**	**15**	**324,651,440**	**20%**	**13%**	**15**	**324,651,440**	**19%**	**3%**

2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Data	5	11,381,000,000		1	2,535,000,000	**0**	**162,325,720**	**0%**	**6%**	0	162,325,720	**0%**	**1%**
2	11	11	2	01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan persampahan	Perbup	1	45,000,000		1	45,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	penanganan sampah	Persen	100	9,308,000,000		100	1,800,000,000	**25**	**162,325,720**	**25%**	**9%**	25	162,325,720	**25%**	**2%**
2	11	11	2	01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya sosialisasi perda/perbup atau penyuluhan tentang pengelolaan sampah	Orang	400	145,000,000		300	90,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	11	11	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	cakupan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Persen	79	762,000,000		76	100,000,000	**0**	**0**	**0%**	**0%**	0	-	**0%**	**0%**
2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tercapainya pengelolaan sampah	Persen	30	500,000,000		30	500,000,000	**5**	**0**	**17%**	**0%**	5	-	**17%**	**0%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba

Analisis kinerja dikaji berdasarkan capaian kinerja pelayanan Indikator pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK antara lain:

1. Indeks kualitas air
2. Indekas kualitas udara;
3. Tutupan lahan;
4. Indeks kualitas lingkungan hidup;
5. Luas areal RTH
6. Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL,UKL,UPL)
7. Cakupan penataan IPAL, IPLT dan TPA
8. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat
9. Persentase jumlah sungai dan danau yang terpantau kualitas airnya
10. Persentase volume sampah yang dikelola.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup mencakup IKK dan IKU secara detail dapat dilihat pada tabel TC-30.

Tabel TC- 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup			dokumen	1	1	-	2	1	1	2	2	
2	Koefisien kualitas air dan udara			nilai	64.05	64.14	64.24	64.33	64.05	64.14	64.24	64.33	
3	Indeks kualitas tutupan lahan			nilai	61.10	62.42	63.75	65.08	61.10	62.42	63.75	65.08	
4	Peresentase pengendalian limbah B3			persen	0	100	100	100	0	0	0	100	
5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota			persen	70	100	100	100	70	100	100	100	
6	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat yang berada di kabupatenkota			MHA	0	2	2	2	0	0	2	2	
7	Jumlah SDM lingkungan Hidup			orang	180	200	50	70	180	150	50	70	
8	Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup			orang / lembaga	0	-	3	-	0	-	3	-	
9	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup			persen	60	100	100	100	60	100	100	100	
10	Terlaksananya Penanganan sampah di Wilayah Kabupaten/kota			persen	74	75	76	77	74	75	76	77	
11	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah			persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan yang menjadi kewenangan daerah. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis, rencana kegiatan serta dokumen anggaran;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan, pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan koordinasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pengembangan kelembagaan masyarakat peduli lingkungan hidup;
7. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan rencana pembuatan TAHURA dan pengelolaannya;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang lingkungan hidup;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
10. Pengelolaan prasarana dan sarana lingkungan hidup;
11. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup

12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Lingkungan Hidup;
13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas pokok dan fungsinya;
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian visi misi Kabupaten Toba menjadi fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Dari 7 misi Kabupaten Toba , misi ke-1 merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup yaitu **" Mewujudkan Infrastruktur Bagus dan Merata."** Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba , isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan.
   a. Masih banyak pelaku usaha /kegiatan yang telah berjalan tanpa adanya izin lingkungan;
   b. Maraknya penebangan pohon, pembalakan liar serta pembakaran hutan dan lahan;
   c. Maraknya perusakan lingkungan dan alih fungsi lahan.
2. Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Undang-undang;
3. Pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim
4. Kurangnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;
5. Meningkatnya timbulan sampah

6. Sarana prasarana pengelolaan persampahan masih minim

7. Pengelolaan dan penanganan sampah di TPA masih system open dumping.

8. Sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih terbatas.

Kedelapan isu penting tersebut menjadi fokus penanganan dan dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba untuk Tahun 2023.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan tema RKP Nasional 2023 yaitu ”**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ,** dengan 7 prioritas pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;**
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Mengacu kepada prioritas nasional, Kabupaten Toba menetapkan 7 misi pembangunan daerah yaitu:

1. Infrastruktur yang bagus dan merata;

2. Membangun SDM yang Unggul dan Andal;

3. Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera;
4. Kesehatan yang Prima dan Terjangkau;
5. Pariwisata Berkat dan Meriah;
6. Membangun Iman yang terpelihara;
7. Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.

Dari 7 misi pembangunan tersebut, yang terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup adalah misi ke-1 dengan tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas air, meningkatnya kualitas udara, dan meningkatnya kualitas tutupan lahan. Review terhadap RKPD 2023 secara rinci disajikan dalam tabel TC-31 berikut. Pada tabel tersebut disajikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Tabel TC-31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 KABUPATEN TOBA

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN**	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**CATATAN PENTING**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Kab.Toba**	**4 Dokumen**	**200,000,000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Tersusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**Kab.Toba**	**2 Dokumen**	**160,000,000**	
	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten		1 buku	200,000,000	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten		2 buku	160,000,000	
	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Dokumen KLHS RDTR		1 Dokumen	200,000,000	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang kabupaten/kota yang disusun		2 Dokumen	160,000,000	
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks kualitas air dan Indeks kualitas udara**		**53.81 74.47**	**340,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Koefisien kualitas air dan air**		**64.24 nilai**	**237,000,000**	
	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Indeks kualitas air		nilai 53.81	70,000,000	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Indeks kualitas air		nilai 53.91	73,500,000	
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Pemantauan kualitas lingkungan		70 titik	70,000,000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut		2 dokumen	73,500,000	

	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	indeks kualitas udara		nilai 74.47	70,000,000	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	indeks kualitas udara		nilai 74.56	73,500,000	
	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	papan himbauan		10 unit	70,000,000	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kab/kota yang dilaksanakan		1 laporan	73,500,000	
	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Persentase usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup		100%	200,000,000	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Persentase usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup		100%	90,000,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah usaha yang mentaati peraturan lingkungan hidup		80 usaha	200,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah daerah dan/atau provinsi dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan		1 dokumen	90,000,000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA**	**Indeks kualitas tutupan lahan**		**62.42**	**300,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA**	**Indeks kualitas tutupan lahan**		**63.75 nilai**	**550,000,000**	
	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati		1 Dokumen	300,000,000	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA	Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati		9 Dokumen	550,000,000	
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	pemeliharaan taman kota		6 unit	300,000,000	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota		450 M^2	250,000,000	

						Penyusunan dan penetapan Rencana Indik Pengelolaan KEHATI yang disusun	Jumlah dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang disusun		1 dokumen	120,000,000	
						Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota		5 ha	180,000,000	
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan olen pemerintah kabupaten/kota**		**100%**	**365,000,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan olen pemerintah kabupaten/kota**		**100%**	**383,250,000**	
	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah oleh pemerintah daerah		100%	365,000,000	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah oleh pemerintah daerah		100%	383,250,000	
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Persentase persetujuan lingkungan		100%	150,000,000	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan		50 dokumen	157,500,000	
	Pengembangan kapasit as pejabat pengawas lingkungan hidup	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) terhadap usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		1:100	50,000,000	Pengembangan kapasit as pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan		50 orang	52,500,000	

	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Persentase usaha yang dimonitoring		100%	65,000,000	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		50 laporan	68,250,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Persentase penertiban usaha		100%	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan Rencana PPLHD		15 dokumen	105,000,000	
5	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota**		**2 MHA**	**578,000,000**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di kabupaten/kota**		**2 MHA**	**285,000,000**	
	Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan		2 MHA	378,000,000	Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan		2 MHA	120,000,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	data MHA		2 MHA	378,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH		2 dokumen	120,000,000	

	Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PLH		2 MHA	200,000,000	Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan MHA terkait PLH		2 MHA	165,000,000	
	Pemberdayaan ,kemitraan,pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	Pelatihan MHA		2 MHA	200,000,000	Pemberdayaan ,kemitraan,pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal,pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan kemitraan, pendampingan dan penguatan		2 dokumen	165,000,000	
6	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah SDM lingkungan hidup**		**200 orang**	**200,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah SDM lingkungan hidup**		**50 orang**	**70,000,000**	
	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan		200 orang	200,000,000	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	Terlaksananya penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan		50 orang	70,000,000	
	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	penyuluhan		200 orang	200,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		2 dokumen	70,000,000	
7	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**		**100%**	**50,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup**		**100%**	**57,000,000**	

	Penyelesaiaan pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak lintas		100%	50,000,000	Penyelesaiaan pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH) kab/kota	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berdampak lintas kabupaten/kota		100%	57,000,000	
	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/kota	Kasus lingkungan hidup		20 kasus	50,000,000	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota yang ditindaklanjuti/ditangani		1 dokumen	57,000,000	
8	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase penanganan sampah**		**75%**	**2,400,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Terlaksananya penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota**		**75%**	**2,505,000,000**	
	Pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		26%	2,400,000,000	Pengelolaan sampah	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		1 dokumen	2,505,000,000	
	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauranulang dan pemanfaatan kembali	Pelatihan daur ulang dan pemanfaatan sampah		5 kegiatan	100,000,000	-	-	-	-	'-	
	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan persampahan		-	-	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan kab/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		1 dokumen	65,000,000	

	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Penanganan sampah		12 bulan	2,200,000,000	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan,diangkut,diolah,diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota		16.000 ton	1,850,000,000	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	terlaksananya sosialisasi perda/perbup atau penyuluhan tentang pengelolaan sampah		-	-	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat,kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat		5 kelompok	90,000,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Cakupan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan		75%	100,000,000	-	-		-	-	
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	tercapainya pengelolaan sampah		-	-	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir		3 unit	500,000,000	
9	**-**	**-**		**-**	**-**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Tersedianya pemberian penghargaan lingkungan hidup**		**3 orang/lembaga**	**100,000,000**	
						Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		3 orang/lembaga	100,000,000	

						Penilaian kinerja masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi dalam PPLH	Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi ang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH		3 entitas	100,000,000	
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**		**100%**	**3,892,014,650**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**3,798,525,515**	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		8 Dokumen	70,000,000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		8 Dokumen	73,000,000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah		8 Dokumen	70,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		8 Dokumen	73,000,000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah		-	-	-	-		-	-	
	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Cakupan administrasi keuangan		100%	2,600,000,000	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Cakupan administrasi keuangan		100%	2,700,000,000	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	2,600,000,000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		29 orang/bulan	2,700,000,000	
	Aministrasi umum perangkat daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah		100%	296,000,000	Aministrasi umum perangkat daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah		100%	279,075,515	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan		14 jenis	8,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		4 paket	8,400,000	

	Penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor		25 jenis	25,000,000	Penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4 paket	26,000,000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih		14 jenis	8,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		4 paket	8,400,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan, Fotocopy dan penggandaan		6 jenis	15,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		4 paket	16,000,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Koran dan majalah		14 jenis	10,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan		4 dokumen	10,275,515	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rakor dalam dan luar daerah		31 orang	230,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		4 laporan	210,000,000	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur		100%	70,000,000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur		100%	73,000,000	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		3 jenis	70,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan		3 unit	73,000,000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	110,000,000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	115,000,000	
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik dan internet		2 jenis	25,000,000	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	26,000,000	
	Penyedian jasa pelayanan umum kantor	Honorarium pengelola keuangan dan tenaga kontrak		8 orang	85,000,000	Penyedian jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang		4 laporan	89,000,000	

	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah		100%	746,014,650	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah		100%	558,450,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan		9 unit	99,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		9 unit	100,000,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan		38 unit	600,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		38 unit	420,000,000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor		1 unit	25,000,000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	25,450,000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan laptop,PC,mesin kantor dan printer		14 unit	22,014,650	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		14 unit	13,000,000	
					8,325,014,650					8,145,775,515	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba ini merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 yang didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif yang transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mendukung perwujudan misi dan misi Kabupaten Toba yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba .

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renja 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba ini dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas baik dari segi penganggarannya maupun dari segi fisiknya.

Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari segi politis maupun birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/ berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi penyesuaian sebagaimana mestinya.

Renja DLH Tahun 2023 di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan atau dokumen pelengkap (petunjuk operasional, kerangka acuan kerja, dan lain-lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalnya serta memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Demikian untuk dilaksanakan.